mitra hijau
Green partnership for the blue planet.

Menggapai Indonesia Bersih 2025

Opini: Doddy S. Sukadri* dan Ari Mochamad**

Polusi di Jakarta saat ini ramai dibicarakan banyak orang. Hampir semua menyalahkan biang keroknya, yaitu transportasi yang mengeluarkan gas karbon dioksida (CO_2) yang berkelebihan, melewati ambang batas yang masih ditoleransi. Namum Masih banyak penyebab lain, yaitu:

- Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang masih menggunakan batubara,
- Industri yang menggunakan sumber energi yang tidak terbaharukan,
- Limbah industri dan rumah tangga,
- Alih guna lahan dan kehutanan.
- Gaya hidup yang boros enengi akan menambah tingginya polusi udara

Menurut hasil riset panel antar negara tentang perubahan iklim (IPCC), **lebih dari 80% emisi GRK merupakan anthropogenic emission atau emisi yang disebabkan berbagai aktivitas manusia**. Jakarta yang saat ini dihuni oleh sekitar 11,24 juta jiwa menurut World Population Review, merupakan kota ke-28 yang terpadat di dunia. Populasi manusia berbanding lurus dengan jumlah emisi GRK. **Semakin padat penduduk, semakin tinggi populasi manusia, dan semakin tinggi pula emisi GRK-nya.**

Mimpi Indonesia Emas 2045

Pada tahun 2045 nanti, saat 100 tahun usia kemerdekaan Indonesia, mimpi anak bangsa adalah melihat lingkungan yang bersih dan baik dan dikelola dengan bijaksana guna mewujudkan amanah UUD 1945 untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. **Berkelanjutan memiliki makna pembangunan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan hasilnya terdistribusikan secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat.** Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus menjadi landasan utama untuk meningkatkan kualitas sosial dan ekonomi.

Dalam konteks ini, komitmen pemerintah terkait strategi pembangunan rendah emisi karbon dan berketangguhan (LTS-LCCR) sangat relevan. Laporan IPCC tentang pemanasan global sebesar 1,5 derajat Celsius pada tahun 2018 menekankan perlunya kebijakan konsisten dalam mengatasi perubahan iklim untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

Oleh karena itu, pemerintah yang baru harus mengutamakan pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim dalam upaya menuju Indonesia Emas 2045. Perubahan iklim berpotensi mengganggu produksi pertanian, meningkatkan risiko bencana, dan merusak ekosistem serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan meningkatnya permukaan air laut. Itu semua menegaskan urgensi penanganan perubahan iklim untuk menjaga keberlanjutan.

Tantangan dan Peluang

Menurut Bappenas, sikap resmi pemerintah Indonesia terhadap isu dan agenda lingkungan dan perubahan iklim adalah dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan untuk memulai fase transisi yang akan mengarah pada transformasi pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Pelaksanaan strategi rendah karbon dan ketahanan iklim memerlukan fokus yang seimbang pada proses koordinasi pemerintah dan pelibatan pemangku kepentingan serta mempertimbangkan isu-isu transisi yang adil, gender, antar generasi, kebutuhan kelompok rentan, masyarakat adat (masyarakat hukum adat) dan masyarakat setempat.

Untuk mencapai hal ini diperlukan dukungan pendanaan yang tidak sedikit. Menurut Badan **Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPLDH) diperlukan sumber dana dari luar APBN**, karena kondisi keuangan negara yang masih jauh dari yang dibutuhkan. Melalui **LTS-LCCR 2050, Indonesia mencari peluang kemitraan internasional** untuk mendukung transisi berkelanjutan menuju ekonomi rendah karbon dan pemulihan hijau pasca pandemi COVID-19 serta keadilan global.

Kemudian menangkap peluang yang ditawarkan dengan tetap memprioritaskan bantuan yang sifatnya hibah lebih diutamakan daripada pinjaman luar negeri. Mencermati pendanaan yang telah masuk atas nama bantuan perubahan iklim harus betul-betul dipastikan penggunaannya dengan baik dan tepat guna. Selain itu perlu ditingkatkan kerja sama dengan sektor swasta dan pengembangan inovasi pembiayaan lainnya. Seluruh pemanfaatan pendanaan ini wajib memperhatikan aspek-aspek kredibilitas dan transparansi pemerintahan serta prioritas pembangunan.

Tantangan Indonesia saat ini dan ke depan dalam agenda pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim lebih memfokuskan pada perbaikan pengelolaan lingkungan hidup yang masih dominan terjadi di banyak wilayah dan di sisi lain untuk merespons ancaman perubahan iklim, kesiapan di dalam negeri melalui dibangunnya mekanisme kerja yang jelas, detail dan capaian kerja yang terukur. Kejelasan dimaknai oleh hasil sikap yang disepakati secara konsisten oleh instansi atau sektor. Ini terwujud bila tugas dan fungsi masing-masing sektor dipahami melalui semangat integrasi program.

Perusakan dan pencemaran air, udara dan tanah, masih menjadi tantangan utama di bidang lingkungan hidup saat ini dan ke depan. Sampah dan limbah, polusi udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak, pencemaran air tanah dan sungai, penyedotan air tanah oleh industri dan pemukiman, kerusakan dan perubahan fungsi lahan hutan berdampak kepada menurun dan hilangnya keanekaragaman hayati di dalamnya, dan perusakan dan pencemaran yang terjadi pada ekosistem laut. Perusakan dan pencemaran kerap terjadi, yang diikuti dengan munculnya konflik ekonomi dan sosial serta bencana lingkungan.

Kegagalan pengelolaan lingkungan juga ditunjukkan pada persoalan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Data menunjukkan bahwa persoalan air di kota–kota besar di Indonesia tidak saja akibat tingginya limpasan air (run off) sebagai dampak minimnya daerah resapan/tangkapan air, tapi juga kualitas air akibat pencemaran industri, intrusi air laut, penurunan air tanah dan kekeringan. Perambahan dan penebangan ilegal dan legal sudah sering disampaikan dan dilaporkan melalui advokasi sejumlah organisasi yang memiliki perhatian dengan persoalan lingkungan.

Kondisi lingkungan hidup yang buruk pada suatu wilayah akan berdampak lebih buruk lagi ketika dihadapkan dengan perubahan iklim. Dampak merugikan yang lebih besar dipicu oleh buruknya pengelolaan lingkungan hidup. Dalam banyak kasus juga diperburuk lagi oleh pelanggaran kebijakan tata ruang, termasuk lemahnya penegakan hukum lingkungan.

Sebagai bagian kesepakatan Paris Agreement, Indonesia telah menyampaikan Nationally Determined Contribution (NDC). Melalui Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience/LTS-LCCR 2050, Indonesia akan meningkatkan ambisi pengurangan GRK untuk semua sektor yang diharapkan puncaknya akan dicapai pada tahun 2030. Kemudian dengan berbagai aksi yang konsisten, peluang untuk maju pesat menuju emisi nol bersih bisa dicapai pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Beberapa kebijakan, yang sifatnya sektoral maupun multi sektoral dituangkan ke dalam instrumen operasional dan panduan teknis. **Tantangan saat ini dan ke depan, adalah sejauh mana implementasi program dan kegiatan mitigasi dapat mencapai tujuan yang ditargetkan; yaitu menurunkan tingkat emisi CO2. Demikian pula untuk aksi adaptasi, sejauh mana mampu menurunkan kerentanan dan meningkatkan ketangguhan.**

Kedua aksi ini sarat dengan kebutuhan pengembangan kapasitas, teknologi dan pendanaan yang besar, sehingga sinergisitas keduanya mendorong efisiensi dan efektivitas pembangunan. Ini artinya investasi yang dilakukan harus mampu menjawab pembangunan rendah karbon dan ketangguhan baik dalam skala nasional maupun skala provinsi, kabupaten dan kota.

SOLUSI KEDEPAN

Inisiatif pemerintah daerah dalam mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim penting dan harus didukung. Setiap wilayah memiliki karakteristik unik, sehingga pendekatan yang berbeda diperlukan. Terlibatnya pemerintah kota sangat strategis karena banyak penduduk dunia tinggal di kota, yang berkontribusi pada pemanasan global. Pendekatan wilayah memungkinkan kita memahami iklim mikro dan merumuskan kebijakan berdasarkan data proyeksi iklim tersebut.

Perubahan iklim juga bisa menjadi momentum bagi kabupaten/kota untuk bertransformasi menjadi kota rendah emisi karbon dan tangguh terhadap perubahan iklim. Untuk mencapai ini, penting untuk mendukung berbagai sumber pendanaan, termasuk APBN, swasta, dan lembaga donor. Namun, masih ada tantangan dalam pengelolaan lingkungan dan risiko perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan yang harus diatasi.

Diperlukan koordinasi antar sektor dan antar pemerintah, serta anggaran negara yang mendukung perubahan iklim. Terobosan diperlukan dalam menjawab tantangan ini, dengan kolaborasi lintas sektor, analisis yang kuat, dan kebijakan holistik. **Tujuan akhirnya adalah merayakan ulang tahun ke-100 Republik Indonesia pada tahun 2045 dengan tata kelola yang lebih baik, pembangunan rendah emisi karbon, dan ketangguhan terhadap perubahan iklim.**

***Doddy S. Sukadri, Executive Director Yayasan Mitra Hijau Indonesia,**
****Ari Mochamad, Program Director Climate Change and Circular Economy, Save the Children-Indonesia**